

# Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Retribusi Parkir (Studi Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya)

**Yanuar Fajar Mukti**

(Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [Yanuar.fajarmukti@yahoo.com](mailto:Yanuar.fajarmukti@yahoo.com)

**Prasetyo Isbandono**

(S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: [Isbandonoprasetyo@gmail.com](mailto:Isbandonoprasetyo@gmail.com)

## Abstrak

Kota Surabaya merupakan wilayah yang sangat besar dan luas sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada setiap tahunnya khususnya pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir karena adanya potensi-potensi yang dapat dijadikan penambahan sumber penerimaan dari sektor perparkiran. Namun pada kenyataannya, realisasi pendapatan dari parkir masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Sehingga penting untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui intensifikasi retribusi parkir serta faktor-faktor yang menjadi penghambat.

Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang juga digunakan sebagai teknik analisis yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian dengan tujuan utama untuk mencari jawaban mendalam atas suatu gejala, fakta atau realita. Fokus pada penelitian ini menggunakan teori dari Jufrizen, (2013) mengenai intensifikasi yang meliputi, *memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan,* meningkatkan efisiensi administrasi, *meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,* dan faktor yang menjadi penghambat upaya UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran melalui intensifikasi retribusi parkir.

Dari analisa yang dilakukan, diketahui UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya melakukan peningkatan PAD melalui retribusi parkir dengan : *memperluas basis penerimaan* melalui perbaikan kualitas pelayanan yang baik terhadap pengendara yang memarkir kendaraannya. Melakukan inovasi pelayanan parkir dengan karcis parkir berhadiah. Memperkuat sistem administrasi untuk menambal kebocoran pendapatan retribusi parkir disebabkan oleh oknum-oknum jukir. *Memperkuat proses pemungutan* dengan membagi jukir dan koordinator jukir, termasuk dalam hal pengumpulan hasil retribusi. *Meningkatkan pengawasan* dengan menyediakan pusat pelaporan *online* dan pengawasan secara langsung dengan melakukan patroli rutin. *Meningkatkan efisiensi administrasi* melalui kompetensi dan kinerja karyawan UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya. *Perencanaan peningkatan kapasitas penerimaan* retribusi parkir, dengan melakukan survei lokasi sehingga target yang ditetapkan sesuai dengan realitas di lapangan.

**Kata Kunci: Intensifikasi, Pendapatan, Retribusi**

## Abstract

Surabaya city area is very large and wide enough affect revenues income from the amount of income existing annually especially income originating from charges for parking because of potentials which can be used additional sources of income parking sector.. But in fact , the income from parking have not fulfill the set target . So important to know and analyze efforts made by city department of transportation surabaya through intensification parking retribution as well as the factors that be a barrier.

Methods to research it uses the kind of research also used as a technique descriptive of analysis qualitative research is approach with the ultimate aim for answers appearance on a phenomenon , fact or reality . Focus on this research using a theory of Jufrizen, ( 2013 ) intensification of which includes, extending the base revenue, strengthen the process to collect, increase the supervision, increase the efficiency of administration, improving the capacity of revenue through planning better, and factors that block efforts to the UPTD Parking Transportation Departement Surabaya in increasing revenue from parking sector through intensification parking retribution.

From the analysis, it is known UPTD Transportation Parking Surabaya do enhancing regional revenue by: expanding the revenue base by improving the quality of good service to motorists who park their vehicles. Innovation parking services with parking ticket prizes. Strengthening the administrative system to patch the parking levy revenue leakage caused by elements parking officers. Strengthening the process of voting by dividing the park interpreter and coordinator of parking officers, including the collection of the levy. Improve oversight by providing online reporting center and direct supervision by a routine patrol. Improving the efficiency of administration through competence and employee performance UPTD

Parking Transportation Department of Surabaya City. Planning the reception capacity building parking fees, to survey the site so that the targets set in accordance with the reality on the ground.

It can be concluded that efforts UPTD Parking Transportation Department of Surabaya in improving the original income of sectors parking intensification with various innovations, namely the parking ticket prizes, planning land survey new parking, appealed parking officers to carry out tasks according to the rules, giving sanction to the parking officers violating and cost efficiency through improved performance fee Transportation Agency officers.

**Keywords: Intensive, Revenue, Retribution.**

## PENDAHULUAN

Pasca reformasi, Indonesia melakukan pembenahan dalam beberapa aspek pemerintahan, salah satunya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang awalnya dilaksanakan secara sentralistik. Asas sentralistik ini bersifat patronase, di mana pemerintah pusat menjadi pengatur semua urusan pemerintahan pusat hingga desa. Akibatnya, pemerintah pusat memikul beban pemerintahan yang sangat berat dan kemudian ambruk, dibuktikan dengan krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 (Haris, 2007). Pasca krisis, Indonesia berbenah, perubahan dilakukan salah satunya adalah perubahan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pokok perubahannya terletak dalam hal kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat berdasarkan prinsip otonomi daerah (Sunarno, 2007).

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk semangat perubahan merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Simanjuntak, 2013). Pelaksanaan kewenangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah menurut Sunarno (2007) dilaksanakan berdasarkan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hal tersebut juga berlaku bagi Pemerintahan Kota Surabaya yang dijuluki kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta, di mana Pemkot Surabaya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Perubahan pola hubungan pemerintah daerah dari yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi berimplikasi pada banyak hal, salah satunya adalah tuntutan terhadap Pemerintah Kota Surabaya untuk mandiri dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Tuntutan kemandirian terhadap Pemerintah Kota Surabaya dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni pendapatan yang bersumber dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 33 Tahun 2004).

Adapun sumber PAD Kota Surabaya adalah pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan, lain-lain pendapatan asli yang sah, pendapatan transfer lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, banyak sumber yang dapat dijadikan sebagai PAD oleh Pemerintah Kota Surabaya. PAD Pemerintah Kota Surabaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-2015:

**Tabel PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2011	Rp. 1.886.514.301.580
2	2012	Rp. 2.279.613.848.832
3	2013	Rp. 2.791.580.050.710
4	2014	Rp. 3.307.323.863.978
5	2015	Rp. 4.035.203.264.499

Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan (2016)

PAD Kota Surabaya sebagaimana tabel di atas yang berasal dari berbagai sumber terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2015. PAD yang terus meningkat tersebut tentu diperoleh salah satunya melalui retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan tempat parkir bagi kendaraan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

Retribusi parkir Kota Surabaya cenderung tidak selalu sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi retribusi parkir tahun 2011 – 2015:

**Tabel Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	Rp. 21.812.866.839,00	Rp. 12.332.401.400,00
2	2012	Rp. 15.111.362.500,00	Rp. 10.470.268.500,00
3	2013	Rp. 15.111.362.500,00	Rp. 9.644.612.000,00
4	2014	Rp. 16.033.386.874,00	Rp. 14.659.645.000,00
5	2015	Rp. 16.585.362.000,00	Rp. 15.362.828.218,00

Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan (2016)

Berikut merupakan data kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 :

Tahun	Retribusi Parkir	PAD	Kontribusi
2011	Rp. 12.332.401.400,00	Rp.1.886.514.301.580	15,3 %
2012	Rp. 10.470.268.500,00	Rp.2.279.613.848.832	21,7%
2013	Rp.	Rp.2.791.580.050.710	28,9%

	9.644.612.000,00		
2014	Rp. 14.659.645.000,00	Rp.3.307.323.863.978	22,5%
2015	Rp. 15.362.828.218,00	Rp.4.035.203.264.499	26,2%

Sumber: UPTD Parkir Dinas Perhubungan (2016)

Data-data di atas menunjukkan bahwa PAD Kota Surabaya terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun hal ini tidak dibarengi dari sektor retribusi parkir yang memang tidak selalu memenuhi target. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi parkir sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Surabaya. Sebab berdasarkan pada tabel di atas, upaya yang selama ini dijalankan, ternyata tidak menjadikan target pendapatan dari retribusi parkir selalu meningkat. Salah satu upaya tersebut adalah intensifikasi yang diwujudkan dengan perhitungan potensi penerimaan, meningkatkan pengawasan, memperkuat proses pemungutan dan peningkatan pelayanan.

Kewenangan yang dimiliki oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dengan melakukan Intensifikasi yaitu suatu upaya, tindakan, atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yakni Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Retribusi Parkir dan Faktor-faktor Penghambat (Studi pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya).

Menurut (Jufrizen, 2013), secara umum upaya yang dapat dilakukan dalam hal meningkatkan PAD melalui intensifikasi dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Memperluas basis penerimaan

Mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi maupun pajak dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Fokus dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh peneliti meliputi :

1. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, dan sanksi terhadap pihak fiskus serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan oleh daerah yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Fokus kedua pada penelitian ini Faktor yang menjadi penghambat Upaya UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir melalui Intensifikasi retribusi parkir.

Pengelompokan jenis data menurut sumber pengambilannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian, baik dengan melakukan observasi, wawancara secara mendalam melalui tatap muka antara peneliti dengan informan, dan yang terakhir dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari beberapa orang, yakni:

a. Tranggono Wahyu Wibowo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang memiliki fungsi menyusun rencana kerja UPTD Pengelolaan Perparkiran.

- b. Hendra Megantara selaku Staff Bagian Tata Usaha UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang memiliki fungsi melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan UPTD Parkir.
- c. Juru Parkir di lapangan selaku pelaksana perparkiran.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari berbagai sumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan memiliki karakteristik dengan lapangan, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi dilakukan secara sistematis dan dilaksanakan di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan beberapa tempat parkir resmi sebagai data pendukung penelitian.

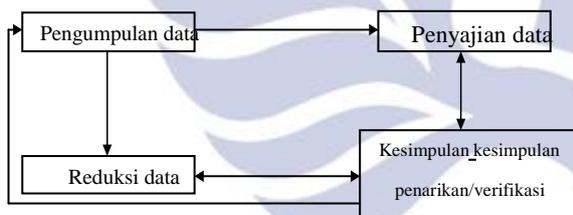
b. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi antara satu orang sebagai pewawancara dan satu orang sebagai penjawab pertanyaan penanya yang disebut informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UPTD Parkir, Staff Tata Usaha UPTD Parkir dan juru parkir resmi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yakni pedoman wawancara, handphone, dan alat pendukung lainnya.

Berikut ini adalah gambar kerangka analisis teknik analisis data:



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246-247)

Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, karena membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda. Menurut Sugiyono (2012:121) hasil penelitian dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang didapat dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mampu diharapkan menjadi sumber pembiayaan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir menjadi tugas dari UPTD Parkir Dinas

Perhubungan Kota Surabaya. UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya memiliki fungsi untuk melaksanakan, mengelola, serta merumuskan kebijakan mengenai perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur ijin penyelenggaraan parkir, pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir. Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan melalui teori jufrizen (2013) adalah (1) *Memperluas Basis Penerimaan* ; UPTD Pakrir Dishub Kota Surabaya dalam meningkatkan PAD melalui retribusi parkir dilakukan melalui perluasan basis penerimaan. Upaya ini pada praktiknya dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap para jukir, menertibkan kedisiplinan para jukir, membina para jukir, dan semua jukir agar mematuhi peraturan kinerja jukir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala bidang UPTD Pakrir Tranggono Wahyu Wibowo dalam wawancara:

“Dari sumber daya manusianya sendiri yang sangat penting seperti contohnya adanya pembinaan. Pembinaan yang dimaksud ini memberikan sistem pelayanan yang baik. Yang kedua, para jukir diwajibkan memakai atribut yang sudah ditentukan oleh dinas perhubungan sebelum melayani masyarakat. Dan yang ketiga, semua jukir agar mematuhi peraturan kinerja jukir yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan”.

Setelah sumber daya manusia perparkiran cukup baik, maka selanjutnya adalah membuat terobosan baru atau kebijakan yang inovatif, salah satunya inovasi karcis berhadiah.

“Setelah semuanya dilaksanakan maka berikutnya mengenai inovasi, yang dimaksud dengan inovasi ini meliputi pembaruan karcis, mungkin karcis sebelumnya hanya sebatas simbolis atas pengguna layanan parkir, akan tetapi saat ini dengan adanya karcis berhadiah diharapkan masyarakat juga berperan dalam hal menggunakan layanan parkir.”

Layanan karcis parkir berhadiah merupakan inovasi dari Dishub Kota Surabaya agar ketika pengendara yang memarkir kendaraannya meminta karcis kepada jukir. Sebab, dalam karcis baru terdapat hologram yang dapat digosok. Apabila beruntung, pengendara akan mendapatkan hadiah menarik.

Inovasi yang dilakukan oleh Dishub seperti karcis berhadiah tersebut akan sangat percuma dikarenakan temuan dilapangan menunjukkan bahwa target yang tinggi di beberapa titik kawasan sehingga para jukir enggan untuk memberikan karcis kepada masyarakat.

Perluasan basis penerimaan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya melalui perluasan penerimaan retribusi parkir. (2) *memperkuat proses pungutan* ; Pada tahap pelaksanaannya, penguatan proses pungutan dilakukan dengan membagi jukir menjadi dua, yakni jukir yang bertugas melakukan pelaksanaan perparkiran dan juga koordinator jukir yang bertugas menerima penyeteroran dari semua pungutan retribusi parkir dari berbagai kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Staff bidang tata usaha UPTD Pakrir Hendra Megantara :

“Jadi juru parkir itu dibagi menjadi dua, yaitu juru parkir yang bertugas sebagai melakukan pelaksanaan perparkiran dan juga kordinator juru parkir yang bertugas

sebagai penerima penyetoran dari semua pungutan retribusi yang dilakukan oleh semua jukir dimasing-masing kawasan yang ada di setiap wilayah dimasing-masing kawasan perparkiran. selanjutnya akan di setorkan kepada petugas dinas perhubungan, untuk melakukan pendataan hasil penerimaan yang telah dipungut dimasing-masing kawasan tiap harinya apakah ada kesesuaian apakah tidak ada kesesuaian penerimaan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka proses pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas dalam pemungutan, sehingga akan ada pembagian tugas sesuai dengan tupoksinya.

Namun demikian, ternyata target dan realisasi retribusi parkir keseluruhan setiap tahunnya tidak harus terealisasi sesuai dengan target keseluruhan yang ditetapkan, melainkan sebagai acuan agar memotivasi kinerja Dishub agar terus meningkat setiap tahunnya. (3) *Meningkatkan Pengawasan* ; Pengawasan dilakukan dengan cara menerjunkan petugas pengawas ke lapangan secara berkala untuk memastikan kinerja jukir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala bidang UPTD Pakrir Tranggono Wahyu Wibowo dalam wawancara:

“Dalam proses pengawasan setiap jukir akan kita tanya mengenai kwitansi penerimaan, kwitansi penerimaan ini merupakan bukti dari jumlah karcis parkir yang dipakai oleh kordinator parkir yang akan dibagikan kepada setiap juru parkir yang sebagai pelaksana perparkiran. Selain itu petugas dari dishub akan memeriksa identitas resmi juru parkir dan juga kelengkapan atribut parkir dalam pengawasan,”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengawasan dilakukan dengan cara melakukan patroli secara rutin yakni setaip pagi-sore dan dari sore-malam.

Pernyataan Dishub mengenai jumlah target berdasarkan karcis yang dipakai jukir ternyata tidak sesuai dengan pernyataan pernyataan jukir di lapangan yaitu mau tidak mau di setiap titik parkir harus terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dishub bukan berdasarkan jumlah perlembar tiket setiap harinya. Selain itu temuan dilapangan juga masih mendapati banyaknya sarana dan prasarana dari jukir yang tidak memadai mengenai kelengkapan atribut dalam pelaksanaan perparkiran. (4) *Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Meneksn Biaya Pemungutan* ; Pencatatan terhadap pungutan, administrasi dan penyetoran retribusi parkir didasarkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang memuat data jukir resmi, potensi masing-masing kawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala bidang UPTD Pakrir Tranggono Wahyu Wibowo dalam wawancara:

“dalam pencatatan terhadap pungutan, administrasi serta penyetoran retribusi parkir disini ada yang namanya SKRD. Penagihan administrasi retribusi parkir memang kita sudah melakukan inovasi dengan menggunakan sistem IT dan hasil penerimaan retribusi parkir itu dilakukan setiap hari selama 1x24 jam dan pada saat itu pula hasil dari retribusi parkir perharinya di setor ke kas umum daerah yaitu dinas pendapatan pengelolaan keuangan”.

Berdasarkan hasil wawancara, maka upaya yang dilakukan dalam rangka meingkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dilakukan

dengan cara dishub melakukan jemput bola langsung pada hari itu juga melakukan pemungutan sekaligus pencatatan dan penyetoran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. (5) *Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik* ; Perencanaan yang dilakukan UPTD Parkir Kota Surabaya dilakukan berdasarkan survei lokasi parkir terhadap beberapa titik potensin dan selanjutnya akan dijadikan sebagai perencanaan dan dimasukkan ke dalam SKRD. Perencanaan juga dilakukan terkait dengan SDM jukir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala bidang UPTD Pakrir Tranggono Wahyu Wibowo dalam wawancara:

“jadi untuk berbicara meningkatkan target dan realisasi maka dinas perhubungan melakukan survey dilapangan terlebih dahulu untuk menentukan berapa titik potensinya, lalu dilakukan pendataan berapa jumlah rata-rata pendapatannya, setelah itu baru dimasukan kedalam perencanaan yang selanjutnya dimasukan kedalam SKRD. Mengenai SDM jukir kedepan dinas perhubungan akan terus melakukan pembinaan mengenai aturan parkir lalu bagaimana dengan kelengkapannya”.

Berdasarkan hasil wawancara, maka perencanaan yang dilakukan oleh UPTD Dishub Kota Surabaya didasarkan pada hasil survei lokasi, meliputi potensi penerimaan dan sumber daya manusianya. Namun demikian, pernyataan dishub apabila tidak dibarengi dengan meningkatkan pembinaan kualitas SDM dari dishub sendiri dan meningkatkan kuantitas sistem yang terencana dan terstruktur dengan baik maka bisa dikatakan perencanaan yang lebih baik tersebut dapat terwujud.

UPTD Parkir sebagai pelaksana dari rencana-rencana Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam merealisasikan target yang ditetapkan untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD kota Surabaya menemui beberapa kendala.

Kendala pertama adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang UPTD Parkir Tranggono Wahyu Wibowo :

“Faktor utamanya dari SDM juru parkir itu sendiri misalkan tariff motor ditentukan dengan besaran 1000 akan tetapi masih terdapat jukir resmi yang meminta lebih dari besaran tariff yang ditentukan,”.

Kendala kedua menurut Tranggono adalah faktor masyarakat.

“Dan yang kedua masyarakat, jadi selama kita sosialisasi pada umumnya masyarkat acuh tak acuh tidak merespon, lalu masyarakat diminta untuk meminta karcis kepada jukir akan tetapi pada kenyataanya juga masyarakat tidak mengikuti arahan yang disosialisasikan oleh dinas perhubungan,”.

Kendala ketiga adalah minimnya kuantitas SDM di Dinas Perhubungan, terutama yang bertugas melakukan pengawasan terhadap para jukir.

“kalau bicara prosedur dalam menjalankan tugas dinas perhubungan pasti menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kalau bilang maksimal didalam kinerja tim itu juga sudah maksimal. Lalu bicara mengenai jumlah fiskus yang bertugas dalam melakukan pengawasan langsung ke jukir mungkin dengan banyaknya jumlah jukir yg beranggotakan 200 lebih itu tidak sebanding dengan jumlah fiskus yang ada di dinas perhubungan.

Kendala keempat adalah adanya jukir-jukir liar yang tidak memberikan kontribusi terhadap retribusi parkir.

“kami tidak menutup mata akan hal itu walaupun oknum-oknum jukir liar sudah di tindak tegas akan tetapi keberadaannya dimasing-masing kawasan selalu ada.”

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, maka pembahasan penelitian melakukan analisis untuk melihat bagaimana deskripsi mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Retribusi Parkir dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, retribusi daerah yang besar akan memberikan dorongan atau sumbangan terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kota Surabaya, metode yang digunakan untuk memperbesar penerimaan adalah dengan intensifikasi, yakni, *memperluas basis penerimaan*, Perluasan basis penerimaan dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, tahap perbaikan kualitas pelayanan jukir. Perbaikan ini dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik, memastikan jukir melaksanakan peraturan yang sudah dibuat UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya dan mewajibkan jukir memakai seragam yang sudah ditetapkan. Kedua, melakukan inovasi pelayanan perparkiran. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna jasa parkir tidak segan meminta karcis dari jukir. Ketiga, memperkuat sistem administrasi. Penguatan sistem administrasi salah satunya untuk menambal kebocoran pendapatan retribusi parkir disebabkan oleh oknum-oknum jukir yang tidak mengindahkan ketertiban. Ketiga upaya intensifikasi retribusi parkir yang dilaksanakan oleh UPTD Dishub Kota Surabaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PAD Kota Surabaya melalui retribusi parkir. Selanjutnya, hasil pungutan retribusi parkir dikumpulkan setiap hari sesuai dengan sub *memperkuat proses pemungutan*, Dalam konteks ini, penguatan proses pemungutan dilakukan dengan membagi jukir menjadi dua jenis, yakni jukir dan koordinator jukir dengan tugas yang berbeda. Dalam hal penguatan proses pungutan, maka jukir bertugas untuk menarik retribusi parkir dari pengendara yang memarkir kendaraannya, sementara koordinator parkir akan menarik hasil retribusi parkir dari para jukir yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dishub Kota Surabaya dan diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya. Bentuk intensifikasi retribusi parkir yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya adalah dengan melakukan pantauan secara komprehensif terhadap praktik pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh jukir. Hal tersebut sesuai pada sub *meningkatkan pengawasan*, Sementara pengawasan dilaksanakan oleh pegawai UPTD Dishub Kota Surabaya dengan cara melakukan patroli secara rutin dan teratur yang terbagi 2 sift yakni, pagi-sore malam. Petugas yang melakukan pengawasan secara langsung mengecek segala perlengkapan jukir serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pungutan retribusi parkir. Dalam melakukan penyeteroran hasil retribusi harus dilakukan seefektif mungkin agar dapat mengefisiensikan waktu dan

tenaga termasuk dalam hal pendistribusian hasil pungutan salah satunya terdapat pada sub *Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan*, Salah satu upaya untuk meningkatkan retribusi parkir adalah menekan biaya administrasi pemungutan melalui efisiensi administrasi. Efisiensi administrasi dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya. Efisiensi juga dilaksanakan dengan cara melaksanakan ketentuan pungutan parkir sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selanjutnya efisiensi dilakukan dengan cara penarikan hasil pungutan setiap hari, sehingga pencatatan tidak menumpuk dan cepat disetorkan ke kas umum daerah. Dalam suatu organisasi rencana kedepan menjadi hal mutlak untuk mencapai tujuannya, termasuk UPTD Dishub Kota Surabaya yang menargetkan peningkatan PAD Kota Surabaya melalui retribusi parkir sesuai pada sub *Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik*, Pada aspek perencanaan, dilakukan dengan menetapkan target pendapatan dan aspek kesiapan jukir. Pada aspek perencanaan pendapatan target retribusi parkir, UPTD Parkir Kota Surabaya melakukannya dengan cara melakukan survei lokasi parkir sehingga target yang ditetapkan sesuai dengan realitas di lapangan. Artinya, target ditetapkan secara realistis.

Intensifikasi sebagai upaya yang dilakukan oleh UPTD Dishub Kota Surabaya untuk meningkatkan PAD melalui retribusi parkir tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi sehingga target tidak selalu tercapai. Faktor penghambat yang dihadapi UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi retribusi parkir adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari UPTD parkir Dishub Kota Surabaya sendiri. Faktor ini meliputi beberapa hal, yakni juru parkir resmi dan UPTD parkir Dishub Kota Surabaya. Dari aspek jukir, faktor penghambatnya adalah adanya kecenderungan jukir yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, kurang tertibnya jukir mengenai kelengkapan atribut parkir, dan masih banyaknya oknum jukir liar yang belum ataupun sudah mendapat tindakan tegas dari Dishub Kota Surabaya. Hambatan tersebut ditambah dengan sistem yang dilakukan oleh dishub, yaitu target penerimaan retribusi perharinya bukan dihitung berdasarkan lembar karcis melainkan nominal yang sudah ditetapkan. Dari aspek dishub, kurang adanya tindakan tegas yang selama ini dilakukan, salah satunya mengenai jukir yang tidak memberikan karcis maupun memberikan besaran parkir tidak sesuai dengan ketetapan yang seharusnya. Selain itu masih adanya tempat-tempat larangan parkir yang masih dijadikan lahan parkir dan belum ada tindakan tegas dari pihak dishub. Faktor lainnya adalah faktor eksternal. Faktor ini timbul dari luar. Faktor ini adalah masyarakat yang acuh tak acuh terhadap sosialisasi dari UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya dalam meningkatkan PAD dari sektor perparkiran adalah dengan melalui intensifikasi. Impelementasi ini dilaksanakan dengan berbagai inovasi, melakukan perencanaan berdasarkan survei lahan parkir baru, menghimbau jukir agar selalu melaksanakan tugas sesuai aturan, memberikan sanksi kepada jukir yang melakukan pelanggaran dan melakukan efisiensi biaya pungutan melalui peningkatan kinerja petugas dishub.
2. Hambatan yang dihadapi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dari sektor perparkiran meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM jukir dan sistem pungutan yang selama ini dilakukan oleh Dishub serta kurang adanya tindakan tegas mengenai fenomena-fenomena perparkiran yang selama ini terjadi. Sementara faktor eksternalnya adalah masyarakat yang kurang mengindahkan sosialisasi UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya.
3. Ada kontradiksi pernyataan antara yang disampaikan oleh Dishub dengan yang dikatakan oleh Juru parkir resmi dilapangan terkait dengan besaran target yang harus disetorkan oleh jukir kepada Dishub.
4. Pengawasan yang selama ini dilakukan masih kurang efektif dikarenakan lambannnya respon yang ditunjukkan petugas Dishub ketika menindak lanjuti laporan dari masyarakat baik mengenai peraturan parkir maupun sarana dan prasarana perparkiran.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya perlu ditingkatkan, salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya ekstensifikasi.
2. Upaya yang harus ditingkatkan UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya yakni melakukan penyisiran di semua kawasan perparkiran agar dapat meminimalisir kebocoran anggaran dari adanya oknum jukir liar yang belum maupun sudah ada penindakan
3. UPTD Parkir Dishub Kota Surabaya perlu melakukan pengarahan terhadap jukir agar selalu mematuhi ketentuan dan menambah jumlah tanaga pengawas jukir serta melakukan sosialisasi yang intensif terhadap seluruh lapisan masyarakat.
4. Besaran target seharusnya dihitung dari perlembar tiket, bukan target nominal.

5. Responsivitas petugas dishub terhadap kritik dan laporan mengenai peraturan perparkiran harus ditingkatkan.
6. Perlunya ketegasan dari Dishub dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak hilang khususnya dalam hal perparkiran.
7. Perlu adanya evaluasi yang harus dilakukan oleh Dishub terkait sistem pengawasan serta pemungutan retribusi parkir yang selama ini dilakukan.
8. Evaluasi seharusnya dilakukan dua arah, yakni evaluasi terhadap Jukir dan evaluasi terhadap Dishub sebagai instansi pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Haris, Symasuddin (ed.), 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cet ke-III, Pusat Penelitian Politik Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Asosiasi Politik Indonesia (AIPI) dan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Jufrizen. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 13, No. 01, April 2013.
- Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.
- Raco, J.R., 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, 2013. *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke XVII, Bandung : Alfabeta
- Sunarno, Siswanto, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. Ke I, Jakarta : Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah